Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) 2022

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 10 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

TEJO HARWANTO
NIP. 19660329 199003 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	11
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	17
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
JL.KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0245. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Serang, 10 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

TR. HARWANTO
NIP. 19660329 199003 1 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp911.161.239 atau mencapai 0,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022 . Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp34.128.202 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp34.128.202; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp34.128.202

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp981.567.451 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-981.567.451, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-981.567.451.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-981.567.451 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 1.015.695.653 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp34.128.202

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	Catatan	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**-**	**-**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	-	911.161.239	-	1.126.935.366
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**-**	**911.161.239**	**-**	**1.126.935.366**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	34.128.202	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		**34.128.202**	**-**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.21	-	-
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	-	-
Jumlah Aset Tetap		**-**	**-**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	-	-
Jumlah Aset Lainnya		**-**	**-**
JUMLAH ASET		**34.128.202**	**-**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**-**	**-**
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	34.128.202	-
JUMLAH EKUTAS		**34.128.202**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**34.128.202**	**-**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		**-**	**-**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	70.406.212	26.128.000
Beban Barang dan Jasa	D.5	286.859.750	420.501.818
Beban Pemeliharaan	D.6	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	624.301.489	680.305.548
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		**981.567.451**	**1.126.935.366**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(981.567.451)**	**(1.126.935.366)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**-**	**-**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(981.567.451)**	**(1.126.935.366)**
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(981.567.451)**	**(1.126.935.366)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	**-**	**-**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(981.567.451)**	**(1.126.935.366)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**-**	**-**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		**-**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1.015.695.653	1.126.935.366
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		34.128.202	-
EKUITAS AKHIR	E.6	**34.128.202**	**-**

A. PENJELASAN UMUM

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara
3. Pemberian perizinan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN yang merupakan entitas pelaporan dari DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

  a. Tanah;

  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan

  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2022	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	913.365.000	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**913.365.000**	**-**

Realisasi Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini dari tahun sebelumnya Tidak ada kenaikan atau penurunan pada realisasi pendapatan tahun berjalan dikarenakan untuk satker divisi pemasyarakatan 648991 tidak memiliki pendapatan dalam hal Penerimaan Pajak ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2022 sebesar 0,00 dari TA 2021 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 sebesar 0,00 dari TA 2021 setoran sitaan hasil korupsi di tahun 2020 meningkat drastis . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Rp911.161.239

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp911.161.239 atau 0,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	-	911.161.239	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**-**	**911.161.239**	**-**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

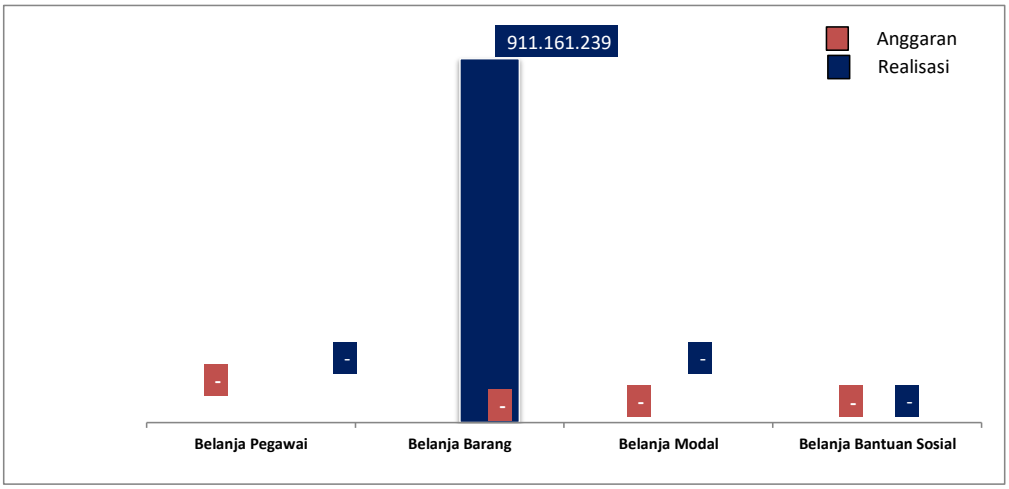

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 19,15% Pada tahun 2022 terdapatan penurunan dalam realisasi belanja tahun berjalan dibanding tahun

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	911.161.239	1.126.935.366	(19,15)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**911.161.239**	**1.126.935.366**	**(19,15)**

Realisasi Belanja Pegawai Rp0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar 0,00 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi antar satker

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Transito	-	-	-
Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Barang Rp911.161.239

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp911.161.239 dan Rp1.126.935.366. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar 19,15% dari Realisasi TA 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	250.259.750	356.801.818	(29,86)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	26.128.000	(100,00)
Belanja Jasa	36.600.000	63.700.000	(42,54)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	624.301.489	680.305.548	(8,23)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**911.161.239**	**1.126.935.366**	**(19,15)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**911.161.239**	**1.126.935.366**	**(19,15)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp60.430.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	52.430.000	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	8.000.000	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**60.430.000**	-

Realisasi Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh tahun 2020 hanya ada belanja modal peralatan mesin untuk alat-alt kantor.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2021. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Rekening Mandiri	30.000.000	-
di brankas	-	-
yang sudah bentuk kuitansi	-	-
-	-	-
Jumlah	**30.000.000**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

-

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

-

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	1.000.000	0,5%	5.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**1.000.000**		**5.000**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Persediaan Rp34.128.202

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp34.128.202 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Barang Konsumsi	34.128.202	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	**34.128.202**	**-**

Persediaan tersebut di atas dalam

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

U R A I A N	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp0

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	**-**
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	**-**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp0

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**-**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a.
b.
c.
d.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp0

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	**-**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**-**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-

-	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	**-**
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	**-**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	**-**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**-**

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	**-**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2022

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		**-**	**-**	**-**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2022

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2022	**-**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**-**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -
b. -
c. -
d -
e. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
-	-	-
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp0

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	**-**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	**-**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**-**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

dgsdfgfdsg

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-
	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

9afhasgdfgsdaifsgdhaf

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

-

Ekuitas Rp34.128.202

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp34.128.202. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Pegawai Rp0

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Persediaan Rp70.406.212

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp70.406.212 dan Rp26.128.000

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 169,47 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Persediaan konsumsi	70.406.212	26.128.000	169,47
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**70.406.212,00**	**26.128.000**	**169,47**

Beban Barang dan Jasa Rp286.859.750

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp286.859.750 dan Rp420.501.818.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 31,78 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Belanja unutk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Bahan	141.889.750	171.979.818	(17,50)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	55.940.000	109.222.000	(48,78)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52.430.000	75.600.000	(30,65)
Beban Jasa Profesi	27.000.000	53.700.000	(49,72)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8.000.000	-	-
Beban Sewa	1.600.000	10.000.000	(84,00)
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Perjalanan Tetap	-	-	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	**286.859.750**	**420.501.818,00**	**(31,78)**

Beban Pemeliharaan Rp0

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Perjalanan Dinas Rp624.301.489

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp624.301.489 dan Rp680.305.548

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8,23 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Perjalanan Biasa	455.002.489	475.785.548	(4,37)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	111.940.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.684.000	38.700.000	(36,22)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.675.000	165.820.000	(80,29)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**624.301.489,00**	**680.305.548**	**(8,23)**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumah Penyusutan	**-**	**-**	**-**
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2022	2021	0,05
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	2022	2021	0,05
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan PNBP	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52.430.000	75.600.000	(30,65)
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**60.430.000,00**	**75.600.000**	**(20,07)**

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :
Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 5 April 2020 senilai Rp45.000.000 , sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Defisit LO Rp.-981.567.451,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.-981.567.451,00 dan Rp.-1.126.935.366,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2022

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2022

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp1.015.695.653

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.015.695.653 dan Rp.1.126.935.366. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	911.161.239
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	(2.052.088.862)
Transfer Masuk	2.156.623.276
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	**1.015.695.653**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp 911.161.239, sedangkan DDEL sebesar Rp 0

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp-2.052.088.862 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2022

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.156.623.276 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2022

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp34.128.202

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.34.128.202,00 dan Rp.0,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.140 KU.03.03 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W12.KU.03.03 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) serta staf Pengelola Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2022, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 :
KPA : TEJO HARWANTO, Bc.I.P, S.I.P., M.Si.
PPK : Agus Suryana, SH, MH
Bendahara : Hafin Jaya Wardana, SE

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORGANISASI	**: 05**	**DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 648991**	**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**

Tgl Data 01/02/23 8:13 AM

Tgl. Cetak 01/02/2023 8:52 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	911,161,239
3.0	521211	Belanja Bahan	141,889,750	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	55,940,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52,430,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,600,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	27,000,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	455,002,489	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,684,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,675,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	111,940,000	0
JUMLAH			**911,161,239**	**911,161,239**

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORGANISASI	**: 05**	**DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 648991**	**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**

Tgl Data 01/02/23 7:58 AM

Tgl. Cetak 01/02/2023 8:52 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	34,128,202	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	911,161,239
0.0	313211	Transfer Keluar	2,052,088,862	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,156,623,276
3.0	521211	Beban Bahan	141,889,750	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	55,940,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52,430,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,600,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	27,000,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	455,002,489	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,684,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,675,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	111,940,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	70,406,212	0
JUMLAH			**3,067,784,515**	**3,067,784,515**

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I	: 05	DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI	: 013052900KD	BA(013) ES1(05) BANTEN
SATUAN KERJA	: 648991	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 01/02/23 8:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 01/02/23 8:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	70,406,212	26,128,000	44,278,212	169.467
Beban Barang dan Jasa	286,859,750	420,501,818	(133,642,068)	(31.782)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	624,301,489	680,305,548	(56,004,059)	(8.232)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	
ESELON I	: 05	DITJEN PEMASYARAKATAN	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 013052900KD	BA(013) ES1(05) BANTEN	Tanggal : 01/02/23 8:50 AM
SATUAN KERJA	: 648991	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
			Tgl Data : 01/02/23 8:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	981,567,451	1,126,935,366	(145,367,915)	(12.899)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(981,567,451)	(1,126,935,366)	145,367,915	(12.899)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(981,567,451)	(1,126,935,366)	145,367,915	(12.899)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(981,567,451)	(1,126,935,366)	145,367,915	(12.899)

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORGANISASI	**: 05**	**DITJEN PEMASYARAKATAN**
KDUAPPAW	**: 013052900KD**	**BA(013) ES1(05) BANTEN**
KODE SATKER	**: 648991**	**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**

Tgl Data 01/02/23 8:15 AM
Tgl. Cetak 01/02/2023 8:52 AM
lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	34,128,202	0	34,128,202	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**34,128,202**	**0**	**34,128,202**	
JUMLAH ASET	**34,128,202**	**0**	**34,128,202**	

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	34,128,202	0	34,128,202	0.00
JUMLAH EKUITAS	**34,128,202**	**0**	**34,128,202**	
JUMLAH EKUITAS	**34,128,202**	**0**	**34,128,202**	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**34,128,202**	**0**	**34,128,202**	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I	: 05	DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	BANTEN
JENIS SATUAN KERJA	: KD	
SATUAN KERJA	: 648991	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 01/02/23 8:16 AM

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 01/02/23 8:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(981,567,451)	(1,126,935,366)	145,367,915	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,015,695,653	1,126,935,366	(111,239,713)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	34,128,202	0	34,128,202	-
EKUITAS AKHIR	34,128,202	0	34,128,202	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I	: 05	DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI	: 013052900KD	BA(013) ES1(05) BANTEN
SATUAN KERJA	: 648991	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 01/02/23 8:18 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 01/02/23 8:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	70,406,212	26,128,000	44,278,212	169.467
Beban Barang dan Jasa	286,859,750	420,501,818	(133,642,068)	(31.782)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	624,301,489	680,305,548	(56,004,059)	(8.232)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	
ESELON I	: 05	DITJEN PEMASYARAKATAN	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 013052900KD	BA(013) ES1(05) BANTEN	Tanggal : 01/02/23 8:18 AM
SATUAN KERJA	: 648991	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
			Tgl Data : 01/02/23 8:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	981,567,451	1,126,935,366	(145,367,915)	(12.899)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(981,567,451)	(1,126,935,366)	145,367,915	(12.899)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(981,567,451)	(1,126,935,366)	145,367,915	(12.899)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(981,567,451)	(1,126,935,366)	145,367,915	(12.899)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013**

ESELON I : **DITJEN PEMASYARAKATAN 05**

SATUAN KERJA : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648991**

Waktu Olap: 2023-02-01 08:08:15.0 [B@60eec363
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 01/02/23 8:52 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	913,365,000	911,161,239	(2,203,761)	100	1,126,980,000	1,126,935,366	44,634	100
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013**

ESELON I : **DITJEN PEMASYARAKATAN 05**

SATUAN KERJA : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648991**

Waktu Olap: 2023-02-01 08:08:15.0 [B@7e92e5a6

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 01/02/23 8:52 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	913,365,000	911,161,239	(2,203,761)	100	1,126,980,000	1,126,935,366	44,634	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	**: 05**	**DITJEN PEMASYARAKATAN**	Tanggal	: 01/02/23 8:53 AM
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	**: 648991**	**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**		Tgl Data	: 1/2/23 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	111,045,000	142,030,000	141,889,750	0	141,889,750	99.9	140,250
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	79,300,000	55,940,000	55,940,000	0	55,940,000	100	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	52,515,000	52,430,000	0	52,430,000	99.84	85,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	190,345,000	250,485,000	250,259,750	0	250,259,750	99.91	225,250
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	16,830,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	68,400,000	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	58,905,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	144,135,000	36,600,000	36,600,000	0	36,600,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	663,395,000	455,200,000	455,002,489	0	455,002,489	99.96	197,511
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,455,000	26,465,000	24,684,000	0	24,684,000	93.27	1,781,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88,650,000	32,675,000	32,675,000	0	32,675,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	111,940,000	111,940,000	0	111,940,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	792,500,000	626,280,000	624,301,489	0	624,301,489	99.68	1,978,511
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,126,980,000	913,365,000	911,161,239	0	911,161,239	99.76	2,203,761
	JUMLAH BELANJA	1,126,980,000	913,365,000	911,161,239	0	911,161,239	99.76	2,203,761

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	**: 05**	**DITJEN PEMASYARAKATAN**	Tanggal	: 01/02/23 8:52 AM
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	**: 648991**	**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**		Tgl Data	: 1/2/23 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	111,045,000	142,030,000	141,889,750	0	141,889,750	99.9	140,250
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	79,300,000	55,940,000	55,940,000	0	55,940,000	100	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	52,515,000	52,430,000	0	52,430,000	99.84	85,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	190,345,000	250,485,000	250,259,750	0	250,259,750	99.91	225,250
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	16,830,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	68,400,000	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	58,905,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	144,135,000	36,600,000	36,600,000	0	36,600,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	663,395,000	455,200,000	455,002,489	0	455,002,489	99.96	197,511
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,455,000	26,465,000	24,684,000	0	24,684,000	93.27	1,781,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88,650,000	32,675,000	32,675,000	0	32,675,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	111,940,000	111,940,000	0	111,940,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	792,500,000	626,280,000	624,301,489	0	624,301,489	99.68	1,978,511
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,126,980,000	913,365,000	911,161,239	0	911,161,239	99.76	2,203,761
	JUMLAH BELANJA	1,126,980,000	913,365,000	911,161,239	0	911,161,239	99.76	2,203,761

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	**: 05**	**DITJEN PEMASYARAKATAN**	Tanggal	: 01/02/23 8:52 AM
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BA(013) ES1(05) BANTEN**	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	**: 648991**	**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**		Tgl Data	: 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	52,515,000	52,430,000	0	52,430,000	99.84	85,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	52,515,000	52,430,000	0	52,430,000	99.84	85,000
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	58,905,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	58,905,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	58,905,000	60,515,000	60,430,000	0	60,430,000	99.86	85,000
	JUMLAH BELANJA	58,905,000	60,515,000	60,430,000	0	60,430,000	99.86	85,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORGANISASI	**: 05**	**DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 648991**	**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN**

Tgl. Cetak 01/02/2023 8:52 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5